



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI

JALAN WAN AMIR NO. 1 KELURAHAN PANGKALAN SESAI KECAMATAN DUMAI BARAT
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 28824

TELEPON (0765) 4302660 (LACAK), FAKSIMILE (0765) 4302660

LAMAN www.kkp.go.id SUREL politeknik.kpdumai@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI
NOMOR: KEP.809/POLTEK.DUM/XII/2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan kedalam rencana strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai tentang Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;

3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Surat Kemenristek dikti No.261/M/XI/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Pangandaran, Jembrana dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai merupakan satuan pendidikan dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

1. Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai merupakan pedoman penyusunan program kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
2. Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra Pendidikan KP, meliputi:

1. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis, isu-isu strategis;
2. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
3. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. penutup.

Pasal 4

Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagai pedoman indikator kinerja program Pendidikan , indikator kinerja kegiatan eselon III dan IV lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, serta kerangka pendanaan, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ini.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Nomor: KEP 724/BRSDM-POLTEK.DUM/V/2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 1 Desember 2025
Direktur Politeknik KP Dumai,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Juniawan Preston Siahaan
NIP. 19750601 200502 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik KP Dumai dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP Dumai, pada pasal 3 disebutkan bahwa Politeknik KP Dumai melaksanakan tugas salah satunya adalah penyusunan rencana dan program pendidikan. Penjabaran tugas terkait penyusunan rencana juga terdapat pada pasal 13 ayat 3 yaitu melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

Renstra Politeknik KP Dumai Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Politeknik KP Dumai merupakan turunan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Renstra Politeknik KP Dumai merupakan turunan dari Presiden melalui renstra KKP dan BPPSDM. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Pembentukan Politeknik KP Dumai merupakan upaya dalam memajukan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana menjadikan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang unggul, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, SDM kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. SDM Kelautan dan Perikanan harus dibekali dengan pengetahuan yang terbaru. Hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

B. Kondisi Umum

Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (PKPD) sebagai institusi pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal baik pada lingkungan yang besar (makro) maupun pada lingkungan yang kecil (mikro). Keberadaan PKPD dengan 3 program studi yaitu Perikanan Tangkap (PTK), Permesinan Kapal (PMK) dan Pengolahan Hasil Laut (PHL) berposisi sebagai respons dari hasil identifikasi kondisi eksternal yang telah dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang tepat khususnya dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan). Tabel 1 menyajikan kondisi eksternal dari aspek lingkungan makro, sedangkan Tabel 2 menjabarkan kondisi eksternal dari aspek lingkungan mikro.

Tabel 1. Kondisi Eksternal Berdasarkan Aspek Lingkungan Makro

Aspek Lingkungan Makro	Tingkat		
	Lokal	Nasional	Internasional
Politik dan Kebijakan	Identifikasi: Kurun waktu 2020-2024 kondisi politik ditingkat Kota Dumai dan Provinsi cenderung stabil;	Identifikasi: Tahun 2023 merupakan masa menjelang pemilu 2024 namun kondisi politik kondusif; Indonesia menjadi “ poros maritim dunia ” Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan komposisi 40% jalur umum dan 60% jalur khusus (anal pelaku usaha perikanan menerima subsidi penuh) Pembatasan interaksi saat covid 19	Identifikasi: <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)</i> Amandemen Manila 2010; <i>Food Safety Management System</i> (ISO 22000:2005); <i>Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)</i> ; Isu TKI di kapal ikan luar negeri; KTT AIS Forum 2023
	Posisi: PKPD menjalin hubungan baik Muspida di wilayah Riau, terbukti dengan selesainya proses hibah tanah dari Walikota ke PKPD (KKP) dan kerja sama dalam beberapa kajian perikanan kelautan;	Posisi: PKPD tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (dengan arahan KKP dan panduan serta aturan dari Kemendikbud) guna menyediakan SDM terampil untuk mencapai Indonesia menjadi poros maritim dunia Memperbesar peluang bagi seluruh putra bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang terjangkau secara biaya dan tetap terjaga kualitasnya Pembelajaran daring dilakukan PKPD sebagai upaya adaptasi terhadap covid 19	Posisi: PKPD menjadi tempat penyelenggara sertifikasi ke pelautan (diakui internasional); PKPD membekali lulusan dengan sertifikasi ke pelautan (diakui internasional) untuk kapal ikan ataupun sertifikat HACCP; PKPD mulai membangun jejaring internasional untuk kepentingan tridarma dan serapan lulusan.
Ekonomi	Identifikasi: Sektor ekonomi di Dumai khususnya dan Riau umumnya mayoritas adalah Industri, Minerba, Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelautan Perikanan Lemahnya kondisi ekonomi pelaku usaha perikanan	Identifikasi: Kondisi ekonomi Indonesia pada periode 2020-2023 masih terdampak pandemi covid 19; Kondisi ekonomi membuat biaya pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau	Identifikasi: Secara umum posisi rupiah melemah terhadap dolar
	Posisi: PKPD dengan kajian di perikanan tangkap, permesinan kapal dan pengolahan hasil laut dapat menjalin kerja sama dengan instansi pada sektor-sektor perekonomian yang ada; Menjadi tempat melanjutkan pendidikan tinggi bagi anak para pelaku usaha perikanan (subsidi penuh)	Posisi: PKPD membekali peserta didik dengan ilmu kewirausahaan agar dapat mengasah kreativitas mereka dalam melihat peluang yang ada agar dapat menggerakkan perekonomian; Menjadi tempat alternatif yang berkualitas untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan	Posisi: PKPD membantu alumni untuk dapat bekerja di luar negeri untuk mengisi sektor kelautan dan perikanan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan nilai tukar dolar yang tinggi terhadap rupiah; PKPD mendorong peserta didik untuk berwirausaha untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan
Sosial Budaya	Identifikasi: Kota Dumai dan pesisir Sumatera bagian timur merupakan salah satu pintu gerbang narkoba; Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Dumai	Identifikasi: Perubahan sikap dan pandangan terhadap era baru teknologi digitalisasi	Identifikasi: Perkembangan teknologi dan digitalisasi di dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan serta globalisasi yang <i>borderless</i>
	Posisi: PKPD menerapkan pendidikan yang mengadopsi sistem militer dengan kedisiplinan tinggi untuk menghindari pengaruh buruk lingkungan dan guna membantu peningkatan nilai IPM di Indonesia	Posisi: Beradaptasi dengan mengadopsi perkembangan teknologi digitalisasi di dunia usaha dan industri bidang perikanan dan kelautan ke dalam bahan ajar	Posisi: PKPD membekali lulusannya dengan kompetensi yang menyesuaikan dunia usaha dan industri terbaru ditunjang dengan kemampuan berbahasa asing
Ilmu Pengetahuan & Teknologi	Identifikasi: Masyarakat memiliki kearifan	Identifikasi: Badan Pusat Statistik (BPS)	Identifikasi: Peringkat PISA Indonesia

Aspek Lingkungan Makro	Tingkat		
	Lokal	Nasional	Internasional
Aspek Lingkungan Makro lokal pada kegiatan kelautan dan perikanan; Industri di wilayah Dumai dan Riau sudah menerapkan teknologi terbaru termasuk untuk digitalisasi	lokal pada kegiatan kelautan dan perikanan; Industri di wilayah Dumai dan Riau sudah menerapkan teknologi terbaru termasuk untuk digitalisasi	2023 mencatat penduduk lulusan SMA/ sederajat paling banyak yakni 30,22%, sedangkan yang paling sedikit adalah lulusan perguruan tinggi yakni 10,15%. partisipasi pendidikan tinggi rendah, teknologi sudah melesat dengan IoT	tahun 2015 berada diperingkat 65 mengalami peningkatan 6 posisi dibandingkan tahun 2012 yang berada di posisi 71; Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia turun dari posisi 37 pada tahun 2016, menjadi 41 ditahun 2017. Lemahnya keamanan data sehingga perlu adanya penguatan data untuk melindungi informasi penting pribadi dan institusi
	Posisi: Meningkatkan kapasitas dengan memperbaharui materi ajar menyesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini dan mengadopsi digitalisasi pada bidang kelautan perikanan tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang ada	Posisi: PKPD akses alternatif untuk tempat mendapatkan pendidikan tinggi yang terjangkau (disubsidi pemerintah) dengan kualitas terjaga dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru termasuk IoT	Posisi: PKPD berupaya untuk berkontribusi peningkatan skor PIS dan GCI dengan memperluas akses pendidikan tinggi khususnya bagi anak pelaku usaha perikanan; Peningkatan perlindungan data perlu dan sudah dilakukan oleh PKPD

Tabel 2. Kondisi Eksternal Berdasarkan Aspek Lingkungan Mikro

Aspek Lingkungan Mikro	Tingkat		
	Lokal	Nasional	Internasional
Letak Geografis	Identifikasi: PKPD langsung berhadapan dengan laut; Perairan laut Dumai dan Provinsi Riau memiliki alur pelayaran yang cukup padat Perairan provinsi Riau memiliki wilayah konservasi kepulauan Aruah dan wilayah untuk Rencana Aksi Nasional konservasi Terubuk	Identifikasi: Berada di WPP RI 571, dekat dengan WPP 711 dan 572	Identifikasi: jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang berhadapan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Jalur ini merupakan wilayah <i>hinterland</i> kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).
	Posisi: PKPD dekat dengan area yang sibuk akan kegiatan perikanan tangkap Wilayah sekitar mendukung untuk pengayaan pengalaman dan pengetahuan skala tradisional	Posisi: PKPD dalam jangka pendek memfokuskan diri untuk melakukan kajian dan berkontribusi baik secara teknis, penelitian dan pengabdian di wilayah 571	Posisi: PKPD telah memulai membangun jejaring internasional untuk kepentingan tridarma dengan Universitas Sabah Malaysia PKPD melalui <i>Teaching Factory</i> telah melakukan ekspor hasil perikanan ke Malaysia pada tahun 2024
Perguruan Tinggi pesaing	Identifikasi: Terdapat 10 Perguruan tinggi di Kota Dumai	Identifikasi: Sangat banyak pendidikan tinggi baik <i>science</i> maupun vokasi yang memiliki bidang ilmu kelautan dan perikanan di Indonesia Perguruan Tinggi vokasi di bawah KKP berjumlah 11 kampus	Identifikasi: Cukup banyak pendidikan tinggi baik <i>science</i> maupun vokasi yang memiliki bidang ilmu kelautan dan perikanan di dunia
	Posisi: PKPD merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Kota Dumai dengan peringkat akreditasi Baik Sekali dan satu-satunya yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan	Posisi: PKPD memiliki keunggulan yaitu biaya yang terjangkau (disubsidi penuh) sehingga menjadi nilai tambah bagi para calon peserta didik yang memiliki keterbatasan biaya	Posisi: PKPD belum masuk peta perguruan tinggi dunia karena belum ter data di perankingan universitas dunia Belum memiliki akreditasi internasional
Program Studi pesaing	Identifikasi: PS Perikanan Tangkap, Permesinan Kapal dan Pengolahan Hasil Laut dengan jenjang Diploma III hanya ada di PKPD Dumai	Identifikasi: PS Perikanan Tangkap, Permesinan Kapal dan Pengolahan Hasil Laut dengan jenjang Diploma 3 hanya terdapat juga padai beberapa kampus di bawah KKP maupun	Identifikasi: Cukup banyak program studi baik <i>science</i> maupun vokasi yang memiliki bidang ilmu kelautan dan perikanan di dunia

Aspek Lingkungan Mikro	Tingkat		
	Lokal	Nasional	Internasional
	Posisi: PS Perikanan Tangkap memiliki peringkat akreditasi unggul, Permesinan Kapal memiliki peringkat akreditasi unggul dan Pengolahan Hasil Laut memiliki peringkat akreditasi baik	Kemendikbud Posisi: PS identik dengan jenjang Diploma 3 berada dibawah KKP, pembedanya adalah peringkat akreditasi PS di Dumai 2 sudah unggul. PS di PKPD memiliki posisi tawar yang baik dengan membekali lulusannya dengan sertifikat ke pelautan kapal ikan yang berlaku internasional dan sertifikat HACCP	Posisi: PS di PKPD belum masuk peta perguruan tinggi dunia karena belum ter data di perangkian universitas dunia Belum memiliki akreditasi internasional
SDM calon peserta didik	Identifikasi: Jumlah penduduk di provinsi Riau tahun 2023 sejumlah 6,7 juta penduduk dan nilai tersebut selalu meningkat setiap tahunnya; jumlah SMA/SMK di provinsi Riau sebanyak 736 sekolah	Identifikasi: Berdasarkan rekam jejak, jumlah pendaftar PKPD terbesar adalah dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi dan Kepulauan Riau	Identifikasi: Sudah terjadi perbincangan awal antara Universitas Sabah Malaysia dengan PKPD untuk melakukan pertukaran mahasiswa
	Posisi: PKPD memiliki potensi SDM yang cukup besar dari Provinsi Riau	Posisi: PKPD memiliki peminat besar dari provinsi yang berada di sekitar Riau	Posisi: PKPD sedang mendalami hal tersebut dengan KKP sebagai institusi induk
Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)	Identifikasi: DUDI di Kota Dumai berfokus pada pengembangan SDM untuk dapat mengoperasikan mesin di pabrik	Identifikasi: Kebijakan pemerintah tentang keterkaitan peran DUDI terhadap pendidikan terutama pada bidang kelautan dan perikanan berpotensi untuk menjadi tempat magang atau PKL maupun masukan dalam menyusun kurikulum dan penyerapan lulusan	Identifikasi: Perusahaan multinasional membutuhkan tenaga yang terampil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku internasional seperti STCW ataupun HACCP serta memiliki keterampilan bahasa asing
	Posisi: PKPD menjadi salah satu penghasil SDM yang digunakan DUDI di wilayah Kota Dumai	Posisi: PKPD telah melibatkan DUDI dalam proses penyusunan kurikulum agar selaras dan memenuhi kebutuhan DUDI PKPD telah bekerja sama dengan beberapa dudi skala nasional untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan serapan lulusan	Posisi: PKPD telah menyesuaikan kurikulumnya dengan IMO Model Course (untuk perikanan tangkap dan permesinan Kapal) serta berpegang terhadap prinsip <i>food security</i> yang dicanangkan FAO (untuk pengolahan hasil Laut) PKPD telah menyiapkan kelas dan program bahasa yang bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
e-Learning	Identifikasi: Fasilitas internet sudah memadai untuk menunjang pembelajaran secara daring dan mandiri	Identifikasi: Sejak pandemi covid 19 terjadi di Indonesia, sistem hybrid mulai dikenalkan sehingga perlu adanya platform untuk pembelajaran daring	Identifikasi: e-learning pada tingkat dunia sudah banyak digunakan untuk sistem pembelajaran, penggunaan sangat efektif dan efisien
	Posisi: PKPD telah memiliki fasilitas e-learning namun belum berjalan optimal	Posisi: PKPD telah memiliki fasilitas e-learning namun belum berjalan optimal karena masih banyak yang memilih menggunakan platform yang ada karena dianggap lebih familiar	Posisi: PKPD perlu melakukan pengembangan <i>e learning</i> yang efektif dan efisien dengan tersandarisasi oleh dunia internasional
Mitra	Identifikasi: Institusi yang membutuhkan civitas academicamaupun institusi pendidikan sebagai mitra kerja di wilayah Dumai sudah teridentifikasi	Identifikasi: Institusi dengan skala nasional yang membutuhkan civitas academicamaupun institusi pendidikan sebagai mitra kerja telah teridentifikasi	Identifikasi: Beberapa mitra internasional baik dari LPK maupun institusi pendidikan tinggi sudah menyatakan minatnya untuk bekerja sama
	Posisi: PKPD sudah berhasil menjalin kerja sama dan menjalankan kegiatan dengan beberapa mitra di wilayah kota Dumai maupun Provinsi Riau	Posisi: PKPD sudah bekerja sama secara formal dan berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan	Posisi: PKPD telah menjalin hubungan kerja sama secara formil dengan mitra internasional sembari terus dilakukan evaluasi dan terobosan untuk kegiatan lainnya
Aliansi	Identifikasi: PKPD memfasilitasi seluruh civitas academia untuk	Identifikasi: PKPD memfasilitasi seluruh civitas academia untuk	Identifikasi: PKPD memfasilitasi seluruh civitas academia untuk memperoleh

Aspek Lingkungan Mikro	Tingkat		
	Lokal	Nasional	Internasional
	berkegiatan dengan aliansi yang ada di wilayah Dumai ataupun Provinsi Riau	bergabung dengan aliansi pada tingkat nasional guna meningkatkan kualitas diri, memperluas relasi dan membuka peluang kolaborasi	akses dan informasi aliansi skala internasional
	Posisi: Beberapa civitas akademika telah berkegiatan bersama aliansi di sekitar wilayah Dumai dan Riau	Posisi: Beberapa civitas akademika telah menjadi anggota pada beberapa aliansi dan telah melakukan kegiatan kolaborasi baik pada bidang pendidikan, penelitian ataupun pengabdian	Posisi: Civitas academicaPKPD masih dalam tahap pencarian informasi untuk aliansi internasional
Pengguna Lulusan	Identifikasi: Pengguna lulusan di wilayah kota Dumai umumnya berfokus pada bidang keteknikan (mesin) dan <i>Quality Control</i> dari produk pangan yang diproduksi oleh suatu pabrik	Identifikasi: Tersedia cukup banyak pengguna lulusan kelautan dan perikanan berskala nasional baik di DUDI maupun pemerintahan	Identifikasi: Pengguna lulusan dari luar negeri sementara ini didapat melalui LPK dan membutuhkan kemampuan bahasa serta sertifikat yang diakui secara internasional
	Posisi: PKPD sudah menempatkan lulusannya di wilayah Dumai (khususnya PS Permesinan kapal dan pengolahan hasil laut)	Posisi: Lulusan PKPD sudah tersebar di berbagai DUDI berskala nasional maupun yang berkecimpung di dunia pemerintahan pada bidang kelautan dan perikanan	Posisi: Lulusan PKPD sudah ada yang bekerja di kapal ikan Jepang, Korea, Suriname dan Australia. PKPD sudah bekerja sama dengan LPK dan telah berhasil memberangkatkan lulusannya untuk bekerja di Jepang

C. Potensi

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sangat bergantung pada potensi kelautan dan perikanan. Hal ini juga diyakini akan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan SDM serta IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan Politeknik KP Dumai. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung pembangunan Politeknik KP Dumai, ada beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk menyusun strategi dan kebijakan Satuan Pendidikan ini, yaitu :

- SDM pelaku utama bidang perikanan tersedia cukup banyak;
- Lahan potensial dan prospektif di wilayah Dumai untuk membantu terlaksananya sistem pendidikan;
- Karakter masyarakat yang maju dan terbuka merupakan kekuatan sosial untuk mendukung pendidikan di wilayah Dumai;
- Pertumbuhan PDB dan investasi bidang teknologi perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, budi daya ikan dan konservasi kelautan yang meningkat;
- Dukungan investasi yang mendukung penguatan Politeknik KP Dumai secara langsung maupun tidak langsung cukup besar;
- Faktor keamanan wilayah yang tinggi dan sosial masyarakat yang kuat.
- Fokus pemerintah untuk pangan (salah satunya pemenuhan kebutuhan pangan dari sektor kelautan dan perikanan).

D. Permasalahan

Permasalahan sekaligus tantangan sektor kelautan dan perikanan di Kota Dumai sangat dituntut kesiapan sumberdaya manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan Politeknik KP Dumai dalam pengembangan SDM di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut meliputi:

- SDM pelaku utama tersedia cukup banyak namun kualifikasinya sangat rendah (*unskill labor*), memerlukan pendidikan dan ketrampilan dalam bidang pengelolaan perikanan terpadu;

- Otonomi daerah dan era globalisasi merupakan ancaman sekaligus peluang yang baik untuk pengembangan dan penguatan pendidikan vokasi;
- Ketatnya persaingan dunia kerja menjadi ancaman dan peluang bagi lulusan pendidikan vokasi Politeknik KP Dumai;
- Saluran distribusi, promosi dan pemasaran hasil tangkap masih lemah;
- Penegakan hukum dan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, budidaya ikan maupun menjamin konservasi kelautan belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen;
- Pembaharuan data kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Politeknik KP Dumai dalam mengantisipasi terjadinya dinamika lingkungan strategis belum sepenuhnya dapat dilaksanakan;
- Kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik Politeknik KP Dumai belum sepenuhnya memadai;
- Pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi masih terbatas.

E. Lingkungan Strategis

Berdasarkan mandat yang diterima dari Pusat Pendidikan KP yaitu melaksanakan program riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, di antaranya adalah melalui penyelenggaraan riset kelautan dan perikanan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (good governance), peningkatan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan (KP) dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak pelaku utama dan pelaku usaha KP.

Oleh karena itu, Politeknik Kelautan dan Perikanan juga menyusun rencana strategis yang mengacu pada mandat yang diterima dari Pusat Pendidikan KP. Politeknik KP Dumai harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang didorong melalui peran pendidikan kelautan dan perikanan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan situasi faktor yang strategis tersebut adalah faktor-faktor strategis yang bersumber dari internal (Internal Factor Strategic) maupun eksternal (External Factor Strategic) baik yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah baik di tingkat regional maupun sektoral. Faktor-faktor strategis internal tersebut meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) Politeknik KP Dumai, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) Politeknik KP Dumai. Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada PKPD disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks IFAS SWOT PKPD

Internal Factor Analysis Summary (IFAS)			
Strengths (Kekuatan)		Weakness (Kelemahan)	
S1	Kinerja seluruh elemen PKPD yang luar biasa dibuktikan dengan 82% Hasil kinerja melampaui target	W1	Lokasi PKPD berada di Selat Malaka yang padat dengan lalu lintas kapal penyebrangan dan barang bukan kegiatan perikanan
S2	Memiliki rencana jangka panjang, menengah dan pendek yang <i>achievable</i> dan terukur	W2	Terdapat 6% IKU yang KTS yaitu target kinerja keuangan penelitian dan PkM, publikasi internasional (tidak bereputasi)
S3	Mendukung pengembangan ekonomi nasional (ekonomi biru) pada kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV)	W3	Proses kerja sama yang secara administratif harus melibatkan KKP sehingga memakan waktu lebih
S4	PKPD memiliki dokumen administrasi yang lengkap dan dapat diakses melalui lama PPID PKPD sebagai penerapan GUG	W4	Kualitas input (Taruna) yang secara finansial maupun kognitif berada pada golongan menengah ke bawah
S5	PKPD berkomitmen untuk menjaga integritas dan suasana akademik melalui pernyataan dalam dokumen, pembentukan senat dan komisi etik akademik	W5	Minat anak pelaku usaha perikanan untuk melanjutkan pendidikan tinggi termasuk rendah
S6	Jiwa kepemimpinan dan keterampilan SDM PKPD sangat baik, sehingga berkesempatan dan diminta berkontribusi (rekognisi) di luar PKPD baik pada organisasi skala nasional maupun internasional	W6	Rasio peminat masih rendah (1:3)

Internal Factor Analysis Summary (IFAS)			
Strengths (Kekuatan)		Weakness (Kelemahan)	
S7	SPM memiliki 3 orang auditor mutu bersertifikat yang diakui secara internasional untuk mendukung budaya mutu di PKPD	W6	Jumlah SDM masih sedikit sehingga beban kerja terlampau tinggi
S8	Budaya mutu sudah berjalan dapat dibuktikan dengan 2 program studi terakreditasi unggul dan 1 program studi terakreditasi baik sekali serta Perguruan Tinggi terakreditasi baik sekali	W7	Mayoritas dosen masih S2
S9	Jejaring Kerja sama yang kuat (8 internasional, 97 nasional dan 17 lokal) ; (92% kerja sama kegiatan tridarma dan 8% untuk serapan lulusan, kewirausahaan dan teaching factory/industry)	W8	Mayoritas jabatan fungsional dosen masih Lektor
S10	Akses Pendidikan Tinggi bagi putra-putri anak pelaku usaha perikanan (Beasiswa Penuh KKP)	W9	Masih ditemukannya kepuasan pada tingkat cukup dalam aspek penguasaan bahasa asing dan penggunaan teknologi informasi
S11	Memiliki terobosan guna mendongkrak prestasi taruna dengan membuat unit dan struktur khusus yang menghasilkan Prestasi bertaraf internasional pada kategori akademik (14) dan non akademik (2)	W10	Nama PKPD masih harum di wilayah KKP, belum mencuat secara nasional
S12	Mengadopsi sistem disiplin militer dan asrama sehingga mudah dibina agar menghasilkan lulusan yang siap bekerja dengan disiplin dan daya juang yang tinggi		
S13	Dosen PKPD Produktif berdasarkan aspek penelitian, PkM, publikasi ilmiah, produk jasa yang diadopsi masyarakat, teknologi tepat guna dan buku ber-ISBN		
S14	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan PKPD memiliki sertifikat keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri		
S15	PKPD memiliki lab dan workshop yang baik untuk menunjang pembelajaran dan tridarma diperkuat dengan sistem dan fasilitas Tefa		
S16	PKPD memiliki keuangan yang sehat ditinjau dari aspek pemeriksaan irjen dapat ditindak lanjuti hingga tuntas dan status WTP KKP		
S17	PKPD memiliki sumber pendanaan alternatif (skema kerja sama dan hibah) untuk kegiatan penelitian dan PkM		
S18	PKPD memiliki tata kelola BMN yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan		
S19	PKPD telah mengoptimalkan sistem teknologi informasi untuk kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan tridarma		
S20	Tempat Sertifikasi keahlian yang diakui secara nasional (LSP-KP BNSP) maupun internasional (sertifikasi Awak Kapal Perikanan)		
S21	Kurikulum yang berbasis kebutuhan industri		
S22	Memiliki terobosan dengan kelas tambahan bahasa asing guna menunjang bekerja ke luar negeri		
S23	Penelitian PKPD dan PkM sudah bertaraf internasional ditinjau dari aspek pendanaan dan publikasi ilmiah		
S24	Kebermanfaatan penelitian dan PkM sudah diterapkan dalam integrasi pembelajaran dan produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat		
S25	Memiliki program terobosan untuk bekerja "Kontrak Kerja Perusahaan (KKP)" bagi para lulusan sejak semester 5 atau semester terakhir		
S26	Lulusan dibekali Sertifikat Pendamping Ijazah		
S27	Lulusan PKPD berdaya saing internasional dan kompeten dibuktikan dengan 24% bekerja di luar negeri dan 84% lulusan PKPD bekerja sesuai bidang serta kepuasan pengguna terhadap kompetensi		

F. Isu-Isu Strategis

Politeknik KP Dumai memiliki peran untuk mendorong peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pendidikan kelautan dan perikanan. Keberadaan Politeknik KP Dumai ikut serta dalam merespon isu strategis pemerintah tahun 2025-2029. Politeknik KP Dumai berkontribusi dalam penanganan isu strategi antara lain:

1. Penurunan angka kemiskinan melalui program penerimaan taruna yang 50% berasal dari masyarakat/pelaku perikanan dan kelautan sebagai upaya peningkatan pembangunan

disektor perikanan dan kelautan dengan sumber daya manusia yang kompeten;

2. Peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung industri melalui program *taching factory* yang merupakan program pembelajaran yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri;
3. Peningkatan perekonomian melalui program kewirausahaan dan sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha bagi taruna/i sehingga diharapkan akan dapat menyerap banyak tenaga kerja;
4. Peningkatan kompetensi taruna berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna sesuai dengan perkembangan zaman
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan pengetahuan/teknologi demi kemajuan masyarakat;
6. Program penelitian yang berorientasi dalam mendukung perekonomian dengan memanfaatkan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbentuk Visi PKPD yaitu "Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Inovatif bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera Tahun 2029".

B. Misi

Misi dibuat dalam upaya mencapai visi secara bertahap. PKPD memiliki 5 misi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan yang professional yang berdaya saing baik nasional maupun internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian terapan yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Melaksanakan kontribusi penerapan ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan dalam membangun daerah dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui dukungan pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi dan pelatihan;
- 4) Menjalin hubungan kerja sama dengan pelaku usaha perikanan, dunia usaha dan dunia industri untuk mewujudkan perikanan mandiri yang berkelanjutan dan terukur;
- 5) Melaksanakan manajemen dan tata kelola yang bersih, efektif dan terpercaya mengacu pada budaya mutu pendidikan.

C. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Politeknik KP Dumai dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025-2029 adalah:

- 1) Menghasilkan SDM yang kompeten, terampil dan berjiwa wirausaha yang berorientasi bisnis dan inovatif serta berdaya saing tinggi untuk meningkatkan perkembangan dunia industri dan dunia usaha bidang perikanan;
- 2) Menghasilkan karya penelitian terapan yang berorientasi pada perkembangan dunia industri dan dunia usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Menghasilkan produk atau jasa yang meningkatkan manfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan dalam berdaya saing;
- 4) Menghasilkan jaringan kerjasama yang produktif yang berperan dalam pengembangan metode pembelajaran, peningkatan kualitas SDM dan teknologi terapan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan;
- 5) Mewujudkan manajemen dan tata kelola yang transparan, kredibel dan akuntabel yang memiliki standar dan kriteria unggul dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis digital dan teknologi informasi.

D. Sasaran Strategis

Strategi dan sasaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai tentunya diturunkan dari Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai. Strategi dan sasaran tersebut sesuai dengan Program Prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terurai sebagai berikut:

2.4.1. Program Prioritas Menterti Kelautan dan Perikanan RI, yakni:

1. Memperluas wilayah konservasi perairan Indonesia
2. Penangkapan Ikan secara terukur
3. Menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan

4. Penataan ruang laut
 5. “Bulan Cinta Laut”.
 6. Mendukung program prioritas presiden salah satunya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
- 2.4.2. Program Prioritas Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan
1. Meningkatkan Kualitas SDM KP
 2. Tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas
 3. Smart Fisheries Village
 4. Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan
 5. Sertifikasi Kompetensi Kelautan dan Perikanan
- 2.4.3. Program Prioritas Kepala Pendidikan Kelautan dan Perikanan
1. Mengembangkan serta memperkuat system kelembagaan pendidikan vokasi KP yang relevan terhadap kebutuhan industry
 2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis keunggulan wilayah maritim
 3. Memperkuat kompetensi dosen, guru, serta peserta didik agar selaras dengan dinamika teknologi dan kebutuhan DUDIKA
 4. Menyiapkan calon wirausaha muda yang berpendidikan sebagai generasi penerus usaha KP
 5. Menyediakan rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan di satuan pendidikan KP sebagai bahan peningkatan kapabilitas pelaku usaha/utama
 6. Untuk melakukan desiminiasi teknologi yang dihasilkan dari penelitian kepada Masyarakat di desa bekerjasama dengan penyuluh

Sehingga Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dalam strategi dan sasaran memuat ketiga program prioritas (Menteri, Kepala BRSDM dan Kepala Pusat Pendidikan) tersebut sesuai tugas dan fungsi Pendidikan tinggi vokasi di bidang kelautan dan perikanan meliputi 3 besaran pokok sasaran dan strategi yakni:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM civitas akademika dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi yang unggul berbasis kepada budaya mutu, tata kelola yang bersih, kebermanfaatan kerjasama dan keberlanjutan, melalui terobosan-terobosan kebijakan yang mengarah kepada outcome dan impact, baik lingkup nasional maupun internasional.
- Peningkatan PNBPNelayan dan Perikanan Tangkap dan Pengolah Ikan direalisasikan dalam bentuk mendorong pelaksanaan kegiatan Teaching Factory dan kewirausahaan secara maksimal serta melakukan transfer ilmu dan teknologi melalui pemberdayaan masyarakat nelayan agar Taruna/I berperan serta sebagai pelaku aktif dalam peningkatan PNBPNelayan dan pengolah Ikan.
- Menggerakkan sektor budidaya terwujud dalam rencana pembentukan unit-unit budidaya serta rencana pembukaan prodi baru yaitu Akuakultur, serta melakukan Kerjasama dengan stakeholder dan pusat riset serta masyarakat sebagai dasar atau langkah awal peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Pendidikan/pelatihan, teknologi tepat guna dan prosedur mendapatkan pemodalan.

Berdasarkan hal tersebut Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai memiliki 19 sasaran strategis untuk mendukung program prioritas presiden, KKP dan BPPSDM. Adapun sasaran strategi tersebut Adalah sebagai berikut:

- Terpenuhinya standar mutu lulusan melalui sertifikasi kompetensi dan pembelajaran industri. (SS1);
- Peningkatan relevansi kurikulum berbasis industri dan ekonomi biru (SS2);
- Menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya mutu serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi (SS3);

- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan dengan teknologi di bidang prodinya (SS4);
- Meningkatkan jumlah produk dan inovasi teknologi/ paten (SS5);
- Upaya meningkatkan jumlah dana penelitian terapan (SS6);
- Meningkatkan jumlah penelitian terapan (SS7);
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah (SS8);
- Terlaksananya Seminar Penelitian (SS9)
- Meningkatkan jumlah mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna (SS10);
- Meningkatkan jumlah dana kegiatan Mitra Binaan dan Kemitraan teknologi tepat guna (SS11);
- Meningkatkan jumlah kegiatan mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna (SS12);
- Meningkatkan jumlah kerjasama dengan SMK, perguruan tinggi dan pemerintah daerah (SS13);
- Meningkatkan jumlah kerjasama dengan UKM dan industry (SS14);
- Publikasi Survei Kepuasan dan Laporan Monev Kerjasama (SS15);
- Meningkatkan indeks efektifitas kebijakan bidang Pendidikan (SS16);
- Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan (SS17);
- Mendapatkan Kategori Kinerja Anggaran yang Baik (SS18); dan
- Penyerapan anggaran sesuai dengan indeks kinerja (SS19)

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN, KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai adalah salah satu Pendidikan Tinggi yang secara teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga dalam menentukan arah kebijakan, sasaran dan strategi serta merancang kerangka regulasi dan kelembagaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai lima tahun kedepan tentunya harus sesuai melalui turunan arah kebijakan dan Strategi Nasional, Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM KP serta Pusat Pendidikan KP yang telah ditetapkan.

A.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional Indonesia periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu visi besar mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini tercermin dalam dokumen RPJMN 2025–2029, yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPN 2025–2045. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai arah strategis pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan. Visi besar yang diusung adalah: "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan."

RPJPN 2025–2045 menjadi dokumen induk yang memandu seluruh perencanaan jangka menengah di tingkat nasional maupun daerah, serta seluruh sektor, termasuk pendidikan tinggi vokasi. Dalam visi tersebut, Indonesia diharapkan menjadi negara berpendapatan tinggi (high-income country), yang ditopang oleh pembangunan manusia unggul, inovasi, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta keberlanjutan lingkungan. Untuk mengawal pelaksanaannya secara bertahap, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai tahap awal dari empat tahap RPJMN selama 20 tahun. RPJMN 2025–2029 berfungsi sebagai:

- 1) Landasan awal pembangunan Indonesia Emas, dengan menekankan pencapaian fondasi transformasi struktural,
- 2) Dokumen operasional utama bagi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyusunan rencana sektoral dan teknis,
- 3) Acuan konsolidasi kebijakan lintas sektor, termasuk sektor kelautan, perikanan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan inovasi.

RPJMN 2025–2029 memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam lima tahun pertama pemerintahan baru, dengan menitikberatkan pada:

- 1) Transformasi sosial melalui pembangunan manusia dan reformasi sistem pendidikan, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi;
- 2) Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, biru, dan berbasis nilai tambah, termasuk hilirisasi hasil laut dan sumber daya pesisir;
- 3) Penguatan ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 4) Penguatan konektivitas wilayah dan infrastruktur strategis, termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam konteks ini, sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dalam pilar transformasi ekonomi biru nasional, dan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan memainkan peran utama dalam mencetak tenaga kerja siap pakai, adaptif terhadap inovasi, serta mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sektor KP, harus merespons RPJMN 2025–2029 melalui perencanaan strategis yang menyesuaikan dengan prioritas nasional dan program unggulan KKP, mendorong kualitas lulusan vokasi yang berkompetensi tinggi, membangun inovasi dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri, serta berperan aktif dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan di kawasan pesisir, pulau kecil, dan daerah tertinggal.

Dengan demikian, dokumen RPJMN 2025–2029 menjadi pijakan utama dalam penyusunan Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan 2026–2031, baik dalam perumusan visi, tujuan, sasaran, maupun arah pengembangan program dan kelembagaan.

A.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, serta potensi ekonomi pesisir yang sangat besar. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045, sektor ini diharapkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendukung ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, pembangunan wilayah terpencil, serta keberlanjutan ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi teknis memiliki mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan konservasi sumber daya alam.

Untuk periode 2025–2029, KKP menekankan pendekatan ekonomi biru (blue economy) sebagai kerangka utama pembangunan sektor KP. Pendekatan ini bertujuan memaksimalkan nilai ekonomi laut secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem laut, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi pelaku utama sektor, khususnya nelayan kecil, pembudidaya, dan masyarakat pesisir. Arah kebijakan strategis KKP disusun dalam lima pilar utama, yaitu:

- 1) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP); Sebagai strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur, kelembagaan, pendidikan, dan digitalisasi layanan, KNMP menjadi platform kolaboratif yang memperkuat ketahanan sosial ekonomi komunitas nelayan dan pembudidaya.
- 2) Transformasi Perikanan Tangkap Berbasis Kuota dan Ekologi; Kebijakan ini bertujuan menata kembali tata kelola perikanan tangkap melalui sistem kuota berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP), dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan stok ikan, serta pemberdayaan nelayan tradisional.
- 3) Penguatan Budidaya Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor; Fokus diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan seperti udang, lobster, rumput laut, dan kepiting, dengan pendekatan kawasan, efisiensi produksi, biosekuriti, dan jaminan mutu, untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama komoditas budidaya dunia.
- 4) Penguatan Kawasan Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir; Termasuk di dalamnya adalah upaya pelestarian ekosistem laut (terumbu karang, mangrove, padang lamun), rehabilitasi wilayah pesisir, serta perlindungan pulau-pulau kecil dan terluar, guna menjamin keberlanjutan sumber daya dan mitigasi perubahan iklim.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan; Melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan sertifikasi kompetensi, KKP mendorong terciptanya SDM sektor KP yang kompeten, produktif, dan berwawasan kelautan. Di dalamnya termasuk revitalisasi peran politeknik kelautan dan perikanan, serta sinergi dengan dunia usaha dan industri.

Kelima pilar tersebut juga diperkuat dengan strategi lintas sektor seperti digitalisasi layanan publik dan pengawasan sumber daya KP, hilirisasi dan industrialisasi hasil kelautan dan perikanan, peningkatan akses pasar dan logistik hasil perikanan, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan arah kebijakan ini, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi wilayah pesisir, pengentasan kemiskinan pesisir, serta ketahanan pangan dan lingkungan laut nasional.

A.3 Arah Kebijakan Badan Riset dan SDM KP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) merupakan unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki

mandat utama dalam pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas SDM sektor kelautan dan perikanan. Fungsi ini dijalankan melalui tiga pilar utama: pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi, serta penyuluhan yang terintegrasi dan saling memperkuat. Sebagai garda depan dalam mendukung arah kebijakan KKP yang berbasis ekonomi biru dan keberlanjutan, BPPSDM KP merumuskan arah kebijakan strategis yang menekankan pada:

- 1) Penguatan Pendidikan Vokasi Berbasis Industri dan Ekosistem Maritim; BPPSDM KP mengarahkan pendidikan vokasi—termasuk politeknik kelautan dan perikanan—untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter, dan kompeten, siap kerja di dunia usaha dan industri (DUDI), serta mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan tantangan lingkungan. Kebijakan ini diwujudkan melalui:
 - Penyesuaian kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar industri,
 - Penerapan sistem Teaching Factory, project-based learning, dan dual system,
 - Penguatan sertifikasi kompetensi dan konektivitas dengan LSP KP,
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana praktik modern,
 - Integrasi riset terapan dan technopreneurship di lingkungan kampus.
- 2) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi; Melalui balai pelatihan, pendidikan dan UPT terkait, BPPSDM KP menyelenggarakan pelatihan teknis, tematik, dan vokasional bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pelaku usaha KP, serta ASN teknis. Fokus pelatihan diarahkan pada komoditas unggulan: udang, lobster, kepiting, rumput laut, teknologi baru dan digitalisasi budidaya atau penangkapan, mitigasi iklim, konservasi, dan keamanan laut, serta tata kelola usaha dan pengembangan UMKM KP. Pelatihan dan pendidikan dilakukan secara klasikal, on-site, maupun digital (e-learning), serta dirancang untuk menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
- 3) Penguatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; Penyuluhan KP berperan sebagai jembatan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat pelaku utama. BPPSDM KP memperkuat sistem penyuluhan melalui revitalisasi kelembagaan penyuluhan berbasis daerah, peningkatan kualitas penyuluh PNS dan swadaya melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan platform digital penyuluhan, dashboard penyuluh, dan sistem informasi masyarakat, serta integrasi program penyuluhan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Lapang, dan Desa Inovasi.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan vokasi di bawah koordinasi BPPSDM KP, Politeknik Kelautan dan Perikanan memiliki posisi penting dalam:

- 1) Menjadi pusat pengembangan kompetensi SDM KP yang unggul dan tersertifikasi,
- 2) Mendukung transfer teknologi dan kewirausahaan bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya melalui pengabdian masyarakat dan Teaching Factory,
- 3) Mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan arah ekonomi biru dan kebutuhan lokal,
- 4) Menjadi simpul kolaborasi antara pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam satu kesatuan strategi peningkatan kualitas SDM.

Dengan demikian, arah kebijakan BPPSDM KP menjadi landasan strategis dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan program Politeknik KP Dumai untuk periode 2027–2031, guna memastikan pendidikan vokasi mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional.

A.4 Arah Kebijakan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Sebagai unit teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Fungsi ini mencakup pembinaan terhadap seluruh politeknik kelautan dan perikanan, serta satuan pendidikan menengah dan dasar berbasis kelautan-perikanan. Dalam kerangka transformasi ekonomi biru dan penguatan daya saing SDM sektor KP, Pusdik KP mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama: relevansi, kualitas, dan keberlanjutan. Kebijakan ini mendukung pencapaian visi KKP dan BPPSDM KP melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Vokasi; Pendidikan vokasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sektor KP, serta mendukung arah kebijakan nasional dan daerah. Fokus utama Pusdik KP mencakup:
 - Revisi dan penyelarasan kurikulum berbasis industri dan KKNI;
 - Penguatan pendekatan Teaching Factory, Work-Based Learning, dan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) versi vokasi;
 - Integrasi soft skills, kepemimpinan maritim, dan etika pesisir dalam pembelajaran;
 - Penyesuaian struktur kompetensi lulusan terhadap kebutuhan kuota perikanan tangkap, industri budidaya, pengolahan, dan kawasan konservasi.
- 2) Penguatan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan; Pusdik KP mendorong seluruh satuan pendidikan tinggi vokasi agar mengembangkan sistem tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel, antara lain melalui:
 - Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan akreditasi nasional/internasional,
 - Pengembangan digitalisasi kampus dan integrasi Sistem Informasi Pendidikan KP,
 - Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
 - Evaluasi sistem manajemen SDM dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan,
 - Penguatan kelembagaan unit pengembangan akademik dan kemitraan industri.
- 3) Pengembangan Jejaring dan Kolaborasi Pendidikan; Sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing global, Pusdik KP mendorong politeknik untuk memperluas jejaring dan sinergi melalui:
 - Kerja sama dengan DUDI dalam on-the-job training, magang, dan dual system,
 - Penguatan kolaborasi riset terapan dan pengabdian masyarakat dengan instansi lokal dan LSM,
 - Inisiasi program student mobility, joint research, dan pertukaran dosen dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri,
 - Keterlibatan aktif politeknik dalam program strategis nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Inovasi, dan Sekolah Lapang KP.

Arah kebijakan Pusdik KP menjadi kerangka utama bagi Politeknik KP Dumai dalam menyusun perencanaan strategis, kebijakan akademik, dan pengembangan kelembagaan. Beberapa implikasi langsungnya adalah:

- Penyesuaian struktur kurikulum dan penguatan link and match dengan industri,
- Peningkatan standar layanan pendidikan dan mutu lulusan melalui sertifikasi profesi,
- Transformasi digital dalam pembelajaran, administrasi akademik, dan monitoring alumni,
- Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan kapasitas, jejaring, dan pemanfaatan sumber daya bersama,
- Integrasi pendidikan vokasi ke dalam pembangunan masyarakat pesisir melalui skema pengabdian, inkubasi bisnis, dan inovasi lokal.

Dengan kebijakan ini, Politeknik KP diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga motor penggerak inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah pesisir, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berkelanjutan.

A.5 Arah Kebijakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, serta menjawab tantangan globalisasi, transformasi ekonomi biru, dan perubahan iklim, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) menetapkan arah kebijakan strategis untuk periode 2027–2031 yang selaras dengan visi misi Presiden, RPJMN 2025–2029, serta arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDM KP, dan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi yang berada langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Dumai memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan berkarakter maritim. Oleh karena itu, arah kebijakan Poltek KP Dumai lima tahun ke depan diarahkan untuk menjawab dua kebutuhan utama yakni meningkatkan daya saing lulusan vokasi sektor kelautan dan perikanan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan wilayah pesisir dan masyarakat kelautan. Adapun fokus arah kebijakan strategis Politeknik KP Dumai meliputi:

- 1) Penguatan Pendidikan Vokasi yang Adaptif dan Berbasis Industri
 - Penyusunan dan penguatan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI), serta mendukung pengembangan ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya kelautan.
 - Penerapan model pembelajaran berbasis Teaching Factory, Work-Based Learning, dan Project-Based Learning.
 - Integrasi literasi digital, kewirausahaan biru (blue technopreneurship), dan konservasi dalam seluruh program studi.
 - Penjaminan mutu akademik melalui akreditasi nasional dan internasional, serta evaluasi kinerja institusi secara periodik.
- 2) Penguatan Riset Terapan, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset terapan yang menjawab kebutuhan daerah dan industri, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan, teknologi tepat guna, dan konservasi pesisir.
 - Peningkatan kontribusi Poltek KP dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Lapang, dan Desa Inovasi KP.
 - Pengembangan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan berbasis kampus, untuk mendukung wirausaha muda maritim.
- 3) Peningkatan Kolaborasi dan Jejaring Strategis
 - Pengembangan kerja sama strategis dengan DUDI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan mitra riset.
 - Peningkatan akses politeknik dalam program-program nasional dan internasional, termasuk magang luar negeri, dual system, serta kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat.
- 4) Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Berbasis Digital
 - Penerapan manajemen pendidikan berbasis data, termasuk Sistem Informasi Akademik, tracer study digital, dan sistem evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa.
 - Penguatan kapasitas kelembagaan melalui reformasi struktur organisasi, penguatan SDM, serta efisiensi tata kelola keuangan dan aset.
 - Pengembangan Layanan Terintegrasi Digital (Smart Campus) untuk mendukung transparansi, efektivitas, dan layanan prima.
- 5) Pemenuhan dan Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan
 - Penataan dan pembangunan sarana-prasarana berbasis standar nasional dan industri.
 - Digitalisasi laboratorium, modernisasi kapal latih, hatchery, workshop, teaching farm, serta fasilitas praktik untuk mendukung sistem pembelajaran berbasis industri.
 - Penyediaan akses pendidikan yang adil dan inklusif, terutama untuk peserta didik dari wilayah pesisir, perbatasan, dan pulau kecil.

Dengan arah kebijakan tersebut, Politeknik KP Dumai meneguhkan komitmennya sebagai institusi vokasi maritim yang tidak hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga melahirkan wirausahawan muda kelautan, agen perubahan di wilayah pesisir, serta kontributor aktif terhadap keberlanjutan laut dan kesejahteraan masyarakat maritim Indonesia.

B. Strategi

Upaya dalam mendukung arah kebijakan yang berorientasi pada pengembangan produk inovasi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata pada masyarakat dan dalam upaya peningkatan kualitas lulusan dengan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menjadi pusat kajian terapan yang dapat memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global, sebagaimana dimaksud di atas perlu adanya strategi pengembangan dan program pengembangan. Adapun strategi pengembangan arah kebijakan Politeknik KP Dumai adalah sebagai berikut:

- Terpenuhinya standar mutu lulusan melalui sertifikasi kompetensi dan pembelajaran industri. (SS1);
- Peningkatan relevansi kurikulum berbasis industri dan ekonomi biru (SS2);
- Menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya mutu serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi (SS3);
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan dengan teknologi di bidang prodinya (SS4);
- Meningkatkan jumlah produk dan inovasi teknologi/ paten (SS5);
- Upaya meningkatkan jumlah dana penelitian terapan (SS6);
- Meningkatkan jumlah penelitian terapan (SS7);
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah (SS8);
- Terlaksananya Seminar Penelitian (SS9)
- Meningkatkan jumlah mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna (SS10);
- Meningkatkan jumlah dana kegiatan Mitra Binaan dan Kemitraan teknologi tepat guna (SS11);
- Meningkatkan jumlah kegiatan mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna (SS12);
- Meningkatkan jumlah kerjasama dengan SMK, perguruan tinggi dan pemerintah daerah (SS13);
- Meningkatkan jumlah kerjasama dengan UKM dan industry (SS14);
- Publikasi Survei Kepuasan dan Laporan Monev Kerjasama (SS15);
- Meningkatkan indeks efektifitas kebijakan bidang Pendidikan (SS16);
- Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan (SS17);
- Mendapatkan Kategori Kinerja Anggaran yang Baik (SS18); dan
- Penyerapan anggaran sesuai dengan indeks kinerja (SS19)

Strategi yang diterapkan	Program Kerja yang dilakukan	PIC	Indikator Keberhasilan
Terpenuhinya standar mutu lulusan melalui sertifikasi kompetensi dan pembelajaran industri	1. Program Competency Certificate (AT/ANKAPIN 1, HCCP dan SIP) Refreshment 2. Program Proviency Certicate (BST, AFF, STCW, AFF, SAT, SDSD dll) 3. Program Sertifikasi BNSP Program Ide Bisnis Kewirausahaan 4. Lomba Kewirausahaan	Pemda, Pusdik KP, Politeknik KP, Dudi, UMKM	Lulus tepat waktu > 90% dan terekam (tracer) > 80% Serapan Lulusan 80% di DUDI dan 10% pada Rintisan Kewirausahaan Minimal 5 sertifikasi kompetensi/ proviensi dimiliki oleh setiap peserta didik
Peningkatan relevansi kurikulum berbasis industri dan ekonomi biru	5. Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum/Silabus 6. Program Dinas Jaga Kapal Latih 7. Program KKP (Dudi dalam Negeri) 8. Program Kelas Bahasa Asing (Dudi Luar Negeri) 9. Program Magang 10. Program Prestasi	Kemendikbud, BRSDM KP, Pusdik KP, Politeknik KP	Menghasilkan Minimal 3 prestasi bergengsi (Nasional/Internasional) akademik dan non akademik.

	11. Program Café Yellow Fin 12. Program PKL dan KPA 13. Expo Job Fair 14. Bimbingan Produk		
Menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya mutu serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.	15. Aplikasi E learning 16. Aplikasi SIDAT 17. Aplikasi Tracer Study 18. Aplikasi Monitoring PKL/KPA	Kemenhub, DJPT, BRSDM, BNSP, DPKAPIN, Pemda, Dudi, UMKM	Kepuasan Pengguna Lulusan di atas 80%
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan dengan teknologi di bidang prodinya	19. Program Pelatihan/Diklat 20. Program Pelatihan Industri 21. Capacity Building	KKP, DJPT, Politeknik KP	Minimal 10 sertifikasi kompetensi dimiliki oleh setiap orang Pendidik maupun Tendik
Meningkatkan jumlah produk dan inovasi teknologi/ paten	22. Program Pelatihan Dokumen Produk Paten 23. Pengembangan E Jurnal Aurellia 24. Program 1 Dosen 1 Publikasi 25. Penerbitan Buku 26. Topik Jurnal sesuai Isu-isu Strategis Nasional	Kemendikbud, BRSDM, Pusdik KP, PTN/PTS, Politeknik KP	Lektor Kepala mencapai lebih 50% Guru Besar mencapai lebih 10%
Upaya meningkatkan jumlah dana penelitian terapan			
Meningkatkan jumlah penelitian terapan			
Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah			
Terlaksananya Seminar Penelitian			
Meningkatkan jumlah mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna	27. Program Kegiatan PKM di Kampung Nelayan 28. Program Pelatihan/ penerbitan modul-modul 29. Voga	Pemda, CSR Pertamina, BRSDM, Pusdik KP, Politeknik KP, KUB	Menghasilkan 1 (satu) mitra binaan dan kemitraan teknologi
Meningkatkan jumlah dana kegiatan Mitra Binaan dan Kemitraan teknologi tepat guna			
Meningkatkan jumlah kegiatan mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna			
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan SMK, perguruan tinggi dan pemerintah daerah	30. Animo Penerimaan Mahasiswa 31. Praktek Kerja Lapang 32. Kerja Praktek Akhir 33. Serapan Dudi dalam Negeri 34. Serapan Dudi luar Negeri 35. Serapan rintisan Kewirausahaan	SMK, PTN/PTS, Pemda, UKM, Dudi dalam negeri dan luar negeri	Pemanfaatan Kerjasama mecapai 80%
Meningkatkan jumlah kerjasama dengan UKM dan industri			
Publikasi Survei Kepuasan dan Laporan Monev Kerjasama			
Meningkatkan indeks efektifitas kebijakan bidang pendidikan	36. Program Video Edukasi tiap 2 bulan 37. Upload kegiatan Media Sosial 38. Audit Internal Non Akademik/semester 39. Publikasi kegiatan di Instagram Politeknik KP Dumai	KKP, BRSDM, PTN/PTS, Pemda, Politeknik KP	
Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan	40. Program Pembentukan Unit Budidaya 41. Jumlah Penjualan produk olahan 42. Pemasaran Pusat Oleh2	Kemenkeu, Pemda, BRSDM, Pusdik KP, Politeknik KP	Rintisan Prodi Baru Akuakultur/ Budi Daya Ikan
Mendapatkan Kategori Kinerja Anggaran yang Baik	43. Rapat Komitmen Serapan Anggaran Tiap Bulan 44. Komitmen SAKIP	Kemenkeu, BPK, Itjen, BRSDM, KPPN, Pusdik KP, Politeknik KP	Nilai PM SAKIP > 80 dan Nilai IKPA > 90
Penyerapan anggaran sesuai dengan indeks kinerja	45. Pengarsipan Dokumen Keuangan 46. Laporan Triwulan pada Tiap Unit	Kemenkeu, BPK, Itjen, BRSDM, KPPN, Pusdik KP, Politeknik KP	Nilai Kinerja Anggaran > 85

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik KP Dumai diperlukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur penyelenggara organisasi. Kerangka regulasi mengacu kepada program regulasi nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

- Organisasi dan Tata Kelola Politeknik KP Dumai
- Statuta Politeknik KP Dumai
- Sistem Pendidikan Politeknik KP Dumai
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik KP Dumai
- Peraturan Kepala Badan tentang Struktur Kurikulum/ Silabus
- Peraturan Kepala Badan tentang PKL dan KPA/ Magang

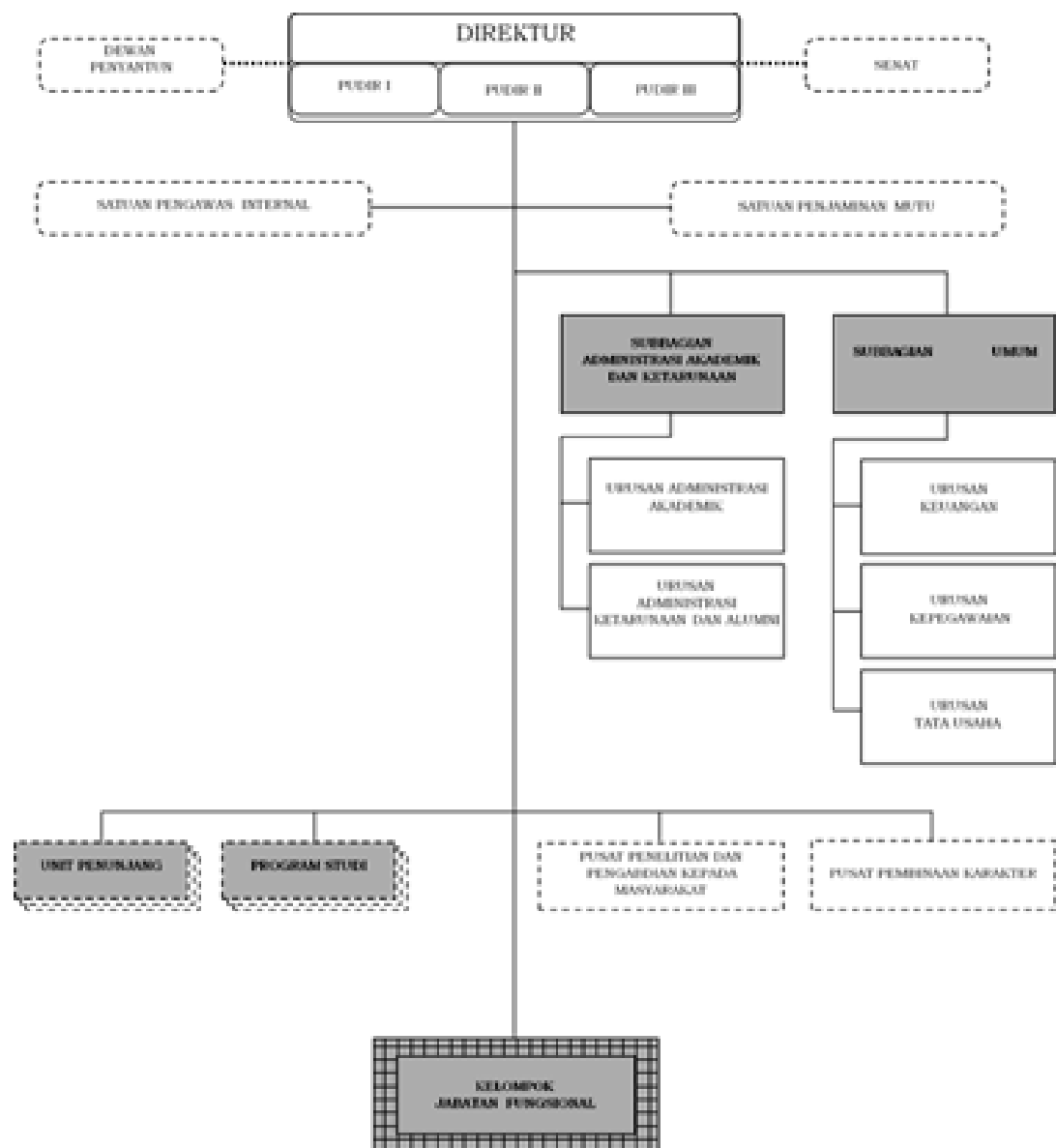
D. Kerangka Kelembagaan

Politeknik KP Dumai merupakan lembaga pendidikan bidang kelautan dan perikanan dengan sistem pendidikan vokasi, dengan tugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan struktur organisasi sehingga terjadi sinergitas antar bidang. Kerangka organisasi Politeknik KP Dumai termaktub dalam Organisasi dan Tata Kelola Politeknik KP Dumai sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai dimana struktur organisasi tersebut terdiri atas:

- Direktur dan Wakil Direktur;
- Dewan Penyantun;
- Senat;
- Satuan Penjaminan Mutu;
- Satuan Pengawas Internal;
- Subbagian Umum;
- Program Studi;
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Pusat Pembinaan Karakter
- Unit Penunjang; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dimana Unit Penunjang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Unit Perpustakaan;
- Unit Laboratorium;
- Unit Teknologi Informatika
- Unit Praktik Kerja;
- Unit Sertifikasi; dan
- Unit Kesehatan.



Lampiran 2 :
Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Dumai Nomor : KEP.809/POLTEK.DUM/XII/2025
Tentang Rencana Strategis Politeknik KP Dumai Tahun
2025-2029

TARGET KINERJA

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Terpenuhinya standar mutu lulusan melalui sertifikasi kompetensi dan pembelajaran industri					
1	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)	5	4	4	3	>3
2	Jumlah lulusan politeknik KP Dumai yang bersertifikat kompetensi (orang)	75	80	85	90	95
3	Jumlah Peserta Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Dumai yang kompeten	75	80	85	90	95
4	Jumlah lulusan Politeknik KP Dumai yang bekerja di luar negeri	5	8	12	18	25
5	Jumlah lulusan Politeknik KP Dumai yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	6	7	8	10
SS2	Peningkatan relevansi kurikulum berbasis industri dan ekonomi biru					
6	Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum/ Silabus	1	1	1	1	1
7	Terselenggaranya program magang, PKL, dan teaching factory terstandar	2	2	3	3	4
8	Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam inovasi dan kompetisi nasional/internasional	5	8	12	18	25
9	Persentase dosen memiliki sertifikasi kualifikasi program studi	65	70	75	80	90
10	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5
SS3	Menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya mutu serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.					
11	Jumlah dokumen data dan publikasi kegiatan Pendidikan	3	4	5	6	7
12	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan Pendidikan	3	4	5	6	7
13	Nilai hasil Asesmen bulan mutu/ Otomasi	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos
SS4	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan dengan teknologi di bidang prodinya					
14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry terhadap jumlah seluruh dosen tetap	50	60	70	80	90
15	Proporsi dosen bergelar S3 meningkat	10%	15%	20%	25%	30%
16	Indeks Profesionalitas ASN	72	74	76	78	80
SS5	Meningkatkan jumlah produk dan inovasi teknologi/ paten					
17	Jumlah Produk Bisnis	2	3	4	5	6
18	Jumlah inovasi teknologi/ paten	1	2	2	3	3
SS6	Upaya meningkatkan jumlah dana penelitian terapan					
19	Jumlah dana penelitian internal	7	8	9	10	12
20	Jumlah dana penelitian eksternal	10	12	15	18	20
SS7	Meningkatkan jumlah penelitian terapan					
21	Jumlah Penelitian Terapan	3	4	5	6	8
22	Jumlah penelitian terapan berasal dari anggaran	3	3	3	3	3
23	Jumlah penelitian terapan berasal dari kerja sama	1	2	3	4	5
SS8	Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah					
24	Publikasi Nasional terakreditasi	8	12	15	18	21
25	Publikasi Internasional bereputasi	3	5	6	8	9
SS9	Terlaksananya Seminar Penelitian					
26	Seminar Nasional	1	1	1	1	1
27	Seminar Internasional	1	1	1	1	1
SS10	Meningkatkan jumlah mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna					
28	Jumlah mitra binaan kampung nelayan	1	1	2	2	2
29	Jumlah mitra binaan kerjasama	2	3	4	5	6
SS11	Meningkatkan jumlah dana kegiatan Mitra Binaan dan Kemitraan teknologi tepat guna					
30	Jumlah dana pkm berasal dari anggaran internal	5	5	7	7	9
31	Jumlah dana pkm berasal dari kerjasama	5	5	8	8	10
SS12	Meningkatkan jumlah kegiatan mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna					
32	Jumlah Kegiatan PKM	2	2	2	3	3
33	Jumlah kegiatan edukasi	1	1	1	1	1
34	Jumlah kegiatan pelatihan/ modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal	2	2	3	3	3
SS13	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan SMK, perguruan tinggi dan pemerintah daerah					
35	Jumlah Kerjasama dengan SMK	2	3	4	5	6
36	Jumlah Kerjasama dengan PT Nasional/Internasional	1	1	2	2	3
37	Jumlah Kerjasama dengan Pemda	2	3	4	5	6
SS1	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan UKM dan industri					

4						
38	Jumlah Kerjasama dengan UKM	2	4	6	8	10
39	Jumlah Kerjasama dengan Industri	3	6	9	12	15
SS1 5	Publikasi Survei Kepuasan dan Laporan Monev Kerjasama					
40	Publikasi Tingkat Kepuasan Mitra Kerjasama	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5
41	Publikasi Laporan Monev kerjasama	2	2	3	3	4
SS1 6	Meningkatkan indeks efektifitas kebijakan bidang pendidikan					
42	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	91	92	92	92	93
43	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	75	75	75
SS1 6	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan					
44	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	1	2	2	3	3
45	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pengadaan	1	2	2	3	3
46	Nilai PNBPN	90	98	120	167	201
SS1 7	Mendapatkan Kategori Kinerja Anggaran yang Baik					
47	Nilai Rekonsiliasi Kinerja	91	92	92	92	93
48	Nilai IKPA	89	89	90	90	91
49	Nilai kinerja anggaran	81	82	82	83	83
50	Nilai PM SAKIP	80	80	80	81	81
SS1 8	Penyerapan anggaran sesuai dengan Indeks Kinerja					
51	Batas tertinggi persentase nilai temuan dibandingkan dengan realisasi anggaran	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5

Lampiran 3 :
Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Dumai Nomor : KEP.809/POLTEK.DUM/XII/2025
Tentang Rencana Strategis Politeknik KP Dumai Tahun
2025-2029

KERANGKA PENDANAAN

PROGRAM (SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA)		TAHUN					Indikasi Pendanaan (Rp Miliar)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pendidikan Tinggi											
SS1	Terpenuhinya standar mutu lulusan melalui sertifikasi kompetensi dan pembelajaran industri						5,539	10,034	10,500	11,000	11,500
1	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)	5	4	4	3	>3					
2	Jumlah lulusan politeknik KP Dumai yang bersertifikat kompetensi (orang)	75	80	85	90	95					
3	Jumlah Peserta Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Dumai yang kompeten	75	80	85	90	95					
4	Jumlah lulusan Politeknik KP Dumai yang bekerja di luar negeri	5	8	12	18	25					
5	Jumlah lulusan Politeknik KP Dumai yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	6	7	8	10					
SS2	Peningkatan relevansi kurikulum berbasis industri dan ekonomi biru										
6	Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum/ Silabus	1	1	1	1	1					
7	Terselenggaranya program magang, PKL, dan teaching factory terstandar	2	2	3	3	4					
8	Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam inovasi dan kompetisi nasional/internasional	5	8	12	18	25					
9	Persentase dosen memiliki sertifikasi kualifikasi program studi	65	70	75	80	90					
10	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5					
SS3	Menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya mutu serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.										
11	Jumlah dokumen data dan publikasi kegiatan Pendidikan	3	4	5	6	7					
12	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan Pendidikan	3	4	5	6	7					
13	Nilai hasil Asesmen bulan mutu/ Otomasi	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos					
SS4	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan dengan teknologi di bidang prodinya										
14	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industry terhadap jumlah seluruh dosen tetap	50	60	70	80	90					
15	Proporsi dosen bergelar S3 meningkat	10%	15%	20%	25%	30%					
16	Indeks Profesionalitas ASN	72	74	76	78	80					
SS5	Meningkatkan jumlah produk dan inovasi teknologi/ paten										
17	Jumlah Produk Bisnis	2	3	4	5	6					
18	Jumlah inovasi teknologi/ paten	1	2	2	3	3					
SS6	Upaya meningkatkan jumlah dana penelitian terapan										
19	Jumlah dana penelitian internal	7	8	9	10	12					

20	Jumlah dana penelitian eksternal	10	12	15	18	20										
SS7	Meningkatkan jumlah penelitian terapan															
21	Jumlah Penelitian Terapan	3	4	5	6	8										
22	Jumlah penelitian terapan berasal dari anggaran	3	3	3	3	3										
23	Jumlah penelitian terapan berasal dari kerja sama	1	2	3	4	5										
SS8	Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah															
24	Publikasi Nasional terakreditasi	8	12	15	18	21										
25	Publikasi Internasional bereputasi	3	5	6	8	9										
SS9	Terlaksananya Seminar Penelitian															
26	Seminar Nasional	1	1	1	1	1										
27	Seminar Internasional	1	1	1	1	1										
SS10	Meningkatkan jumlah mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna															
28	Jumlah mitra binaan kampung nelayan	1	1	2	2	2										
29	Jumlah mitra binaan kerjasama	2	3	4	5	6										
SS11	Meningkatkan jumlah dana kegiatan Mitra Binaan dan Kemitraan teknologi tepat guna															
30	Jumlah dana pkm berasal dari anggaran internal	5	5	7	7	9										
31	Jumlah dana pkm berasal dari kerjasama	5	5	8	8	10										
SS12	Meningkatkan jumlah kegiatan mitra binaan dan kemitraan teknologi tepat guna															
32	Jumlah Kegiatan PKM	2	2	2	3	3										
33	Jumlah kegiatan edukasi	1	1	1	1	1										
34	Jumlah kegiatan pelatihan/ modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal	2	2	3	3	3										
SS13	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan SMK, perguruan tinggi dan pemerintah daerah															
35	Jumlah Kerjasama dengan SMK	2	3	4	5	6										
36	Jumlah Kerjasama dengan PT Nasional/Internasional	1	1	2	2	3										
37	Jumlah Kerjasama dengan Pemda	2	3	4	5	6										
SS14	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan UKM dan industri															
38	Jumlah Kerjasama dengan UKM	2	4	6	8	10										
39	Jumlah Kerjasama dengan Industri	3	6	9	12	15										
SS15	Publikasi Survei Kepuasan dan Laporan Monev Kerjasama															
40	Publikasi Tingkat Kepuasan Mitra Kerjasama	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5										
41	Publikasi Laporan Monev kerjasama	2	2	3	3	4										
SS16	Meningkatkan indeks efektifitas kebijakan bidang pendidikan															
42	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	91	92	92	92	93										
43	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	75	75	75										
SS16	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan															
44	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	1	2	2	3	3										
45	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pengadaan	1	2	2	3	3										
46	Nilai PNPB	90	98	120	167	201										
Program Dukungan Manajemen																
SS17	Mendapatkan Kategori Kinerja Anggaran yang Baik											8,492	8,292	8,500	8,750	9,000
47	Nilai Rekonsiliasi Kinerja	91	92	92	92	93										
48	Nilai IKPA	89	89	90	90	91										

49	Nilai kinerja anggaran	81	82	82	83	83					
50	Nilai PM SAKIP	80	80	80	81	81					
SS18	Penyerapan anggaran sesuai dengan Indeks Kinerja										
51	Batas tertinggi persentase nilai temuan dibandingkan dengan realisasi anggaran	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5					